

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kehadiran Amerika Serikat kembali dengan kebijakan melakukan kerjasama dengan Venezuela yang pernah melakukan pemutusan hubungan diplomatik adalah hal yang sangat menarik untuk dikaji karena hubungan yang konfrontatif selama pasca terpilihnya Hugo Chavez menjadi presiden Venezuela yang di akibatkan perbedaan idiologi ekonomi. Hubungan ini kemudian mulai ada titik perdamaian pasca terpilihnya Obama sebagai presiden Amerika serikat yang berasal dari Partai demokrat¹. Pergantian kebijakan di AS inilah yang melatarbelakangi membaiknya hubungan dilomatik antar dua negara tersebut.

Venezuela mempunyai potensi perekonomian yang maju, negara ini adalah ladang yang terbaik bagi Amerika Serikat untuk menancapkan investasinya, karena dikenal mempunyai sumber daya alam yang melimpah yaitu sebagai penyimpanan cadangan minyak terbesar kelima di dunia dan mempunyai kuantitas batu bara, biji besi, bauksit, dan juga emas², Sehingga banyak kepentingan ekonomi Amerika Serikat di wilayah ini. Merasa sebagai polisi dunia Amerika Serikat selalu mencampuri urusan Venezuela demi kebijakannya. liberalisme telah tertanam oleh amerika serikat, sehingga pada masa sebelum kepemimpinan Hugo Chavez,

¹“Venezuela akan Pulihkan Hubungan Diplomatik dengan AS”,
<http://www.mediaindonesia.com/read/2009/04/19/70540/42/6/>

² <http://www.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=news.detail&id=70757>

Venezuela adalah termasuk Negara Amerika Latin yang sangat bergantung pada Amerika Serikat.

Pada tahun 1976 pemerintahan Venezuela mendirikan perusahaan minyak Negara Venezuela Petroleus de Venezuela atau PDVSA yang dikelola oleh pihak swasta dan para kapitalis. PDVSA dibentuk untuk mempercepat nasionalisasi industry minyak pada pemerintahan Carlos Andrez Perez. Setelah nasionalisasi PDVSA, penghasilan Venezuela sangat melimpah. Venezuela mendapatkan kepemimpinan di antara Negara-negara amerika latin dan memberikan dukungan dari hegemoni terhadap Amerika serikat. Namun karena keteledoran dan pengeluaran yang sangat ceroboh dan korupsi yang sangat besar maka Venezuela menjadi Negara penghutang. Hubungan AS dan Venezuela pada masa itu cukup baik sehingga tidak segan-segan memprivatisasi perusahaannya dan menjalin hubungan dengan IMF. Dan kebijakan yang membawa kekeadaan yang kacau dan kemiskinanpun berlanjut ketika menaikkan harga bahan bakar minyak dan gas. Sampai akhirnya terpilih Hugo Chavez dari pemilu langsung dan cukup demokratis pada tahun 1998, wajah baru kebijakan Venezuela³

Sejak pemerintahan Hugo Chavez di Venezuela dan Amerika Serikat Dibawah pemerintahan George W Bush ada banyak bukti atau tanda-tanda ketidak harmonisan ke dua negara tersebut, sebagai berikut:

³ Soyomukti, Nurani. *Revolusi Bolivarian Hugo Chavez dan Politik Radikal*, Resist Book, Yogyakarta, 2007

- a. Terpilihnya Hugo Chaves yang anti imperialisme Amerika Serikat dan menentang kapitalisme internasional dan neoliberalisme. Dan mengancam adanya perdagangan bebas. Mengakibatkan meningkatnya intervensi AS ke Venezuela dengan berbagai cara salah satunya melakukan kudeta untuk menggulingkan kepresidenan Hugo Chaves karena hal ini merupakan ancaman bagi kebijakan George W Bush dalam menguasai Venezuela kembali, Tapi akhirnya gagal dilakukan, rakyat tetap berpihak pada Chavez. Hal ini yang mendasari Chavez ingin membuat kebijakan-Kebijakan yang radikal anti AS.⁴
- b. Adanya kebijakan nasionalisasi perusahaan asing di Venezuela oleh Hugo Chaves dan persepsi anti Amerika Serikat. Kebijakan ini didasarkan atas cara pandang Hugo Chaves terhadap pemerintahan W.Bush. Yang neoliberal, dan dalam hal ini Chaves melihat adanya eksploitasi terhadap minyak secara besar-besaran.⁵
- c. Tanda hubungan ini semakin memuncak ketika Chavez mengusir dubes AS September 2008 terkait dengan polemik kegiatan AS di Bolivia, tetangga dekat Venezuela. Saat itu AS masih diperintah George W. Bush. Washington pun tak mau kalah, mengusir dubes Venezuela.⁶

Kehadiran Barack Obama sebagai presiden AS pada tahun 2008, memperlihatkan adanya perubahan hubungan yang lebih baik dengan Venezuela dilihat dari:

⁴ "Latin America" <http://www.jadedsage.com/id/category/>

⁵ Ibid.

⁶ <http://www.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=news.detail&id=70757>

- a. dalam KTT negara-negara AS , Presiden Chavez mendekati Menlu Hilary dan mereka membicarakan pengiriman kembali dubes-dubes ke pos-pos mereka masing di Karakas dan Washington Roy Chaderton sebagai dubes baru untuk AS, Chaderton sebelumnya adalah menlu Chavez dan wakil Venezuela di Organisasi Negara-negara Amerika di Washington.⁷
- b. Adanya perencanaan Ekstradisi bekas mata-mata CIA, Luis Posada Carriles, yang dituduh merencanakan pemboman tahun 1976 terhadap jet Kuba yang menewaskan 70 orang, dapat meningkatkan hubungan bilateral AS-Venezuela⁸
- c. Adanya awal positif yang meluluhkan persepsi anti Amerika Serikat Chaves. Yang disebabkan oleh kebijakan baru AS yaitu Penutupan penjara Guantanamo, masyarakat internasional melihat adanya kooperatif dari kebijakan AS dibawah pemerintahan Barack Obama.⁹ Penjara rahasia Guantanamo terletak di kepulauan Kuba yang dibentuk beberapa bulan pasca peristiwa 11 September 2001 oleh pemerintahan Bush. Hal ini dilakukan Bush untuk menginterogasi para tahanan yang dituding terlibat aksi teroris. Hingga saat ini, 250 orang mendekam dalam tahanan Guantanamo. Tanpa melalui prosedur pengadilan, mereka disiksa dan tidak memperoleh hak asasinya¹⁰

⁷“Venezuela akan Pulihkan Hubungan Diplomatik dengan AS”,
<http://www.mediaindonesia.com/read/2009/04/19/70540/42/6/>

⁸“Hugo Chavez minta Obama serahkan bekas agen CIA”, <http://www.surya.co.id/2009/01/31/>

⁹ Kompas, “arah baru politik global AS,” 30-04-2009. Hal 7

¹⁰ http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=7676&Itemid=48

Dari perbedaan di atas, Dapat dilihat bahwa dibawah pemerintahan Barack Obama, menunjukkan adanya perubahan arah kebijakan politik Amerika Serikat yang mencoba merangkul musuh-musuh AS dengan lebih kooperatif. Dan hal ini disambut baik oleh beberapa negara termasuk Venezuela yang merupakan salah satu musuh terbesar AS pada masa pemeritahan George W Bush, hal ini dilakukan pasti dengan tujuan yang tak lepas dari kepentingan nasional AS, ketika keadaan ekonomi AS khususnya dan dunia pada umumnya sedang kolaps, AS menjadi satu-satunya negara yang dicap sebagai penyebab utama atas semua ini, selain itu citra AS selaku polisi dunia yang sudah melorot tajam dimata internasional akibat kebijakan-kebijakan dari Presiden George W. Bush.¹¹

Negara-negara konsumen senjata dan alat-alat perang sekarang ini memilih Rusia sebagai produsen mereka ketimbang AS. AS sekarang menjadi negara adidaya yang terkucilkan. Dengan keadaan seperti ini Obama melihat Venezuela sebagai negara yang memimpin negara-negara kawasan Amerika Latin lainnya yang anti AS setelah kepemimpinan Kuba melalui Fidel Castro yang sudah habis masanya, maka dari itu penting bagi AS untuk merangkul Venezuela dengan harapan negara-negara lainnya yang anti AS ikut melunak.¹²

¹¹ Op.cit

¹² “Will Obama change US policy toward latin america”,
<http://hcvanalysis.wordpress.com/2009/02/19/>

B. RUMUSAN MASALAH:

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas dapat di rumuskan suatu permasalahan dalam penelitian ini, yaitu apa yang melatar belakangi kebijakan Amerika Serikat ingin menjalin kerjasama dengan Venezuela pada masa pemerintahan Barack Obama?

C. KERANGKA TEORI:

Peran dari teori sangatlah penting dalam kajian ilmu hubungan internasional, bahkan teori menduduki posisi kunci saat sebagai alat untuk menganalisa berbagai gejala fenomena yang terjadi dalam dunia hubungan internasional, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan decision making theory.

Decision Making Theory

Teori pengambilan keputusan dan kebijaksanaan politik luar negeri yang di kemukakan oleh William D. Coplin yang menyatakan:

To be interested in why states behave as they do interest area, we have to be interested in why their leaders make the decision. However, it would be mistake to think that foreign policy makers act in vacuum. On the contrary, any given foreign policy act may be viewed as the result of three board categories of considerations affecting the foreign policy decision makers state. The first is domestic politics within the foreign policy decision makers states. The second is economy and military capability of the state. The third is the international contex the particular position in which his state finds it self specially in relation to other state in system.¹³

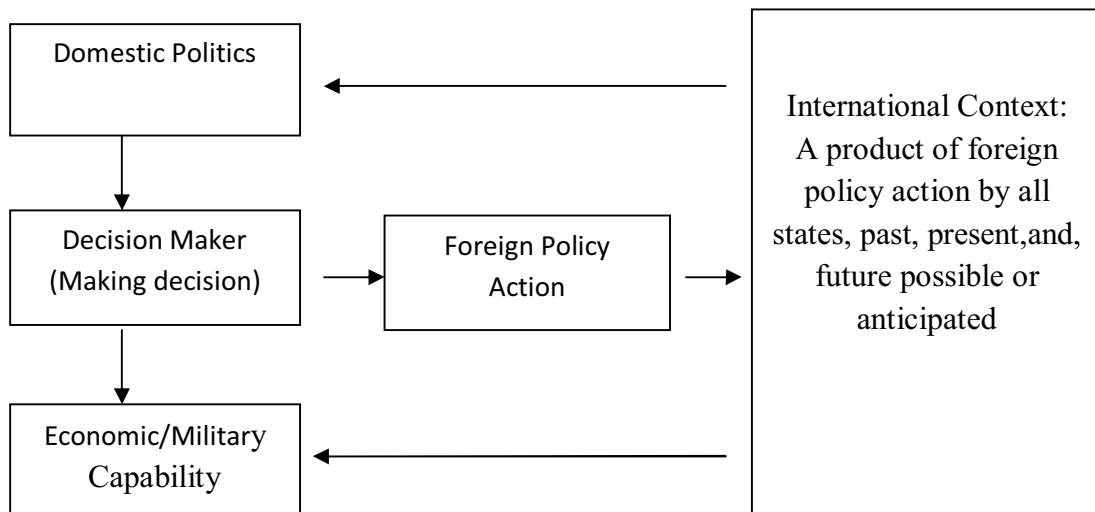
Menurut wiliam D.Coplin, pengambilan suatu kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor determinan, antara lain:

¹³ William D. Coplin, *pengantar politik internasional: Suatu Telaah Teoritities CV.sinar baru, Bandung 1992*, hal 30

1. Situasi politik domestik, bahwa politik dalam negeri hanyalah seperangkat determinan yang bekerja dalam politik luar negeri negara-negara. Walaupun keterbukaan suatu sistem politik atau tingkat stabilitas dalam negeri yang dialami oleh sistem itu, bisa membentuk aspek-aspek politik luar negeri tertentu, faktor-faktor lain juga bisa bekerja didalamnya, seperti kepribadian pengambilan keputusan atau struktur konsep internasional.
2. Situasi ekonomi dan militer domestik, yakni suatu negara harus memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menopang politik luar negerinya. Termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan.
3. Konteks internasional, ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu: geografis, ekonomis, dan politis. lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu; dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara itu dengan negara-negara lain.

Penjelasan tersebut lebih terinci dapat disimak dengan diagram teory pembuatan kebijakan politik luar negeri, sebagai berikut:

Gambar 1.1 Diagram Teori Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri



Sumber : William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional: *suatu telaah teoritis*.

CV sinar baru, Bandung 1992

Dalam proses kebijakan luar negeri ada tiga model, yaitu: *The democratic model; pluralist model; atau ruling elite model*. tapi biasanya para analisis kebijakan AS umumnya mengikuti salah satu dari tiga model tersebut:

1. *democratic model*, model ini berpegang bahwa kebijakan merefleksikan pilihan-pilihan publik melalui proses pemilu dan institusi-institusi perwakilan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pandangan ini, berbagai kebijakan diformulasikan 'by the people, for the people', dan pemerintah adalah penyambung mulut terpercaya masyarakat. Namun, ada hal yang tidak terbukti dari pernyataan diatas karena banyak rakyat AS yang tidak ikut

memilih, dan para pejabat tidak selalu punya persepsi akurat atas pilihan-pilihan publik, atau mengabaikannya sama sekali. *Democratic model* cenderung naif dan bahkan lebih sulit untuk diaplikasikan pada arena yang lebih tertutup dari *foreign policy-making* dibanding wilayah kebijakan lain.¹⁴

2. *pluralist model*, yang melihat pembuatan kebijakan AS sebagai sebuah "highly politicized conflict resolution process".¹⁵ mayoritas publik tidak mendapat informasi, tidak tertarik, dan tidak pula aktif dalam *decision-making process*, pengaruh mereka ada ditangan kelompok-kelompok kepentingan, masing-masing merepresentasikan satu bagian dari masyarakat. Pembuatan keputusan terdiri dari *bargaining and compromise* diantara pusat-pusat persekutuan kekuasaan. Kekuasaan terdesentralisasi, didistribusikan dalam beberapa segi, seperti kesejahteraan, pengetahuan, dan kepentingan. Disini, mayoritas publik tidak terlibat.¹⁶ Model ini telah dikritik karena terlalu bersandar pada ukuran empiris dan *behaviourism*, saat beroperasi dibawah asumsi-asumsi normatif yang meragukan dan tidak demokratis. Sebagaimana dalam model sebelumnya, kebijakan luar negeri kurang sesuai dalam kerangka ini dibanding kesesuaiannya pada kebijakan domestik. Namun, kemampuan pluralisme untuk memahami salah satu sistem politik terkomples di dunia, dan komprominya atas demokrasi ideal dan berbagai

¹⁴ Brewer, T.L. 1992. *American Foreign Policy: A Contemporary Introduction*, 3rd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, hal. 34.

¹⁵ Dumbrell, J. 1990. *The Making of US Foreign Policy*. Manchester: Manchester University Press, hal.53

¹⁶Kegley & Wittkopf, *op cit*, hal. 295

realitas politik yang keras, telah menjadikannya satu eksplanasi yang lebih populer dari yang lain.

3. *ruling elite model* berasumsi keberadaan elit politik yang relatif kecil dan bersatu menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan kepentingan-kepentingannya melalui pilihan-pilihan kebijakannya. Elit kadang terdiri dari sedikit keluarga kaya, kadang berbentuk apa yang disebut "military industrial complex", mungkin juga aktoraktor dari kelompok yang lebih berbeda. Para eksponen model ini biasanya berpendapat atas perubahan-perubahan sistemik dan struktural dalam masyarakat, sebagai "*what holds (elites) together is their common interest in preserving a system that assures their continued accumulation of wealth and enjoyment of social privilege.*"¹⁷

Para elit pada dasarnya konservatif dan hanya akan menyetujui perubahan-perubahan yang menguntungkan dalam kebijakan. Teori ini didukung bukti kondisi kontemporer AS saat ini. Terdapat kemiripan dalam latar belakang dan kultur dari para pembuat kebijakan, yang cenderung pada pria kulit putih, Protestan, dari keturunan Anglo-Saxon dan dari kalangan bisnis.¹⁸

Dalam Konstitusi AS, keputusan kebijakan luar negeri berada di tangan presiden dan Kongres. Kebijakan luar negeri yang dihasilkan oleh eksekutif harus

¹⁷ Brewer, *op cit*, p. 40.

¹⁸As quoted in Mervin, *op cit*, p. 133. Also see Schlesinger, A. 2004. *War and the American Presidency*.

mendapat persetujuan legislatif agar dapat diimplementasikan.¹⁹ Dalam perumusan kebijakan luar negeri AS, presiden tidak dapat melepaskan diri dari berbagai masukan dari para penasihatnya, baik staf pribadi yang berkantor di Gedung Putih maupun para anggota kabinet yang tergabung dalam National Security Council (NSC). Tidak tertutup kemungkinan, para penasihat itu tidak hanya memberikan masukan tentang kebijakan luar negeri yang harus diambil AS, tapi juga memberikan pengaruh agar presiden mengikuti nasihat yang diajukannya. Pengaruh tidak hanya berasal dari orang dalam pemerintahan, tapi juga dari luar pemerintahan, seperti *interest groups*, media massa, dan publik.

Kebijakan Obama yang lebih kooperatif dalam menjalin kerjasama internasional khususnya kerjasama bilateral dengan Venezuela dari proses pemilihan rasional yang dilakukan oleh para perumus kebijakan. Proses pemilihan rasional itu dijalankan oleh para perumus kebijakan luar negeri yang terdiri dari lima pihak yang mewakili lembaga, Joe Biden (Wakil Presiden), Hillary Clinton (Departemen Luar Negeri), Robert M. Gates (Departemen Pertahanan), Stephen Hadley (Penasihat Keamanan Nasional).

Mereka tergabung dalam National Security Council (NSC) yang dibentuk Kongres pada 1947 untuk membantu presiden mengintegrasikan kebijakan luar negeri, ekonomi, dan militer yang mempengaruhi keamanan nasional. NSC bekerja langsung di bawah presiden dan secara hukum terdiri dari presiden, wakil presiden,

¹⁹ Kennet Janda, Jeffrey M. Berry, and Jerry Goldman. 1992. *The Challenge of Democracy: Government in America*, Third Edition. Boston: Houghton Mifflin Company, hal. 742

menteri luar negeri, dan menteri pertahanan. Di samping itu, direktur CIA, kepala staf Gedung Putih, Jaksa Agung, dan penasihat keamanan nasional juga terlibat di dalamnya.²⁰

Dalam pengambilan keputusan model pluralist terdapat aktor-aktor kepentingan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri disebut dengan “*policy influencers*”. Menurut D.Coplin juga menjelaskan *policy influencer system* merupakan aktor politik domestik dalam pengambilan keputusan.²¹ Hubungan antara pengambil keputusan dengan *policy influencers* terjadi secara timbal balik. Di satu sisi, pengambil keputusan membutuhkan *policy influencers* karena mereka merupakan sumber dukungan baginya. Di sisi lain, *policy influencers* membutuhkan pengambil keputusan untuk mempermudah jalan tuntutan diputuskan sebagai suatu kebijakan. Apabila tuntutan *policy influencers* tidak dipenuhi pengambil keputusan, maka dapat dipastikan sebagian atau bahkan seluruh dukungan *policy influencers* kepada pengambil keputusan akan hilang. Pengambil keputusan tidak selalu menanggapi tuntutan itu secara positif. Tetapi, para pengambil keputusan pada akhirnya akan mengakomodasi sampai batas tertentu untuk bisa mengabaikan tuntutan itu.²² Coplin membedakan *policy influencers* menjadi empat macam.²³

1. *Bureaucratic influencer*, misalnya beberapa individu atau organisasi dalam lembaga pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam

²⁰ *Ibid.*, hal 642-649

²¹ Coplin, *Op.Cit.*, hal. 73-74.

²² *Ibid.*, hal. 75-76.

²³ *Ibid.*, hal. 82-91.

menyusun dan melaksanakan kebijakan luar negeri. Anggota birokrasi yang bertindak sebagai *policy influencer* kadang juga menjadi pengambil keputusan. *Bureaucratic influencer* memiliki akses langsung kepada para pengambil keputusan dengan memberikan informasi kepada mereka sekaligus melaksanakan kebijakan luar negeri yang diputuskan. Karenanya, *bureaucratic influencer* memiliki pengaruh sangat besar dalam pengambilan keputusan.

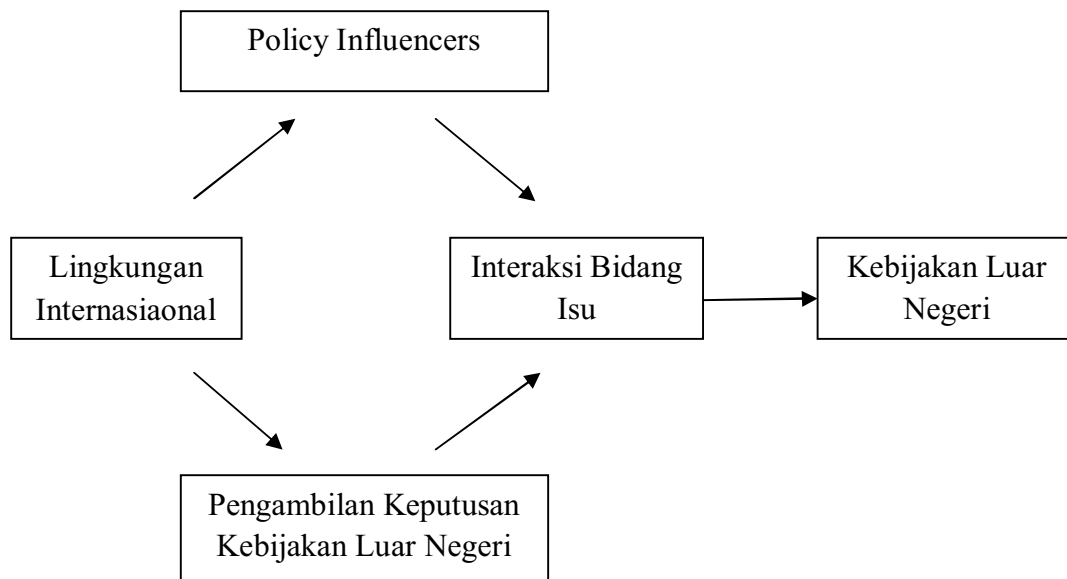
2. *Partisan influencer*, kelompok yang bertujuan untuk menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis terkait kebijakan pemerintah. Mereka berupaya mempengaruhi kebijakan dengan cara menekan para penguasa dan dengan menyediakan orang-orang yang bisa berperan dalam pengambilan keputusan. Misalnya partai politik dalam sistem demokrasi.
3. *Interest influencer*, yakni sekelompok individu yang bergabung bersama karena mempunyai kepentingan sama. *Interest influencer* memakai beberapa metode untuk membentuk dukungan terhadap kepentingannya. Mereka biasanya melancarkan kampanye dengan menulis surat yang tidak hanya diarahkan kepada para pengambil keputusan, tapi juga *bureaucratic* dan *partisan influencer*. Mereka juga bisa menjanjikan dukungan finansial atau mengancam menarik dukungan. Jika tidak berperan dalam menentukan kebijakan luar negeri, *interest influencer* pasti berperan dalam mengkritisi para pengambil keputusan kebijakan luar negeri.

4. *Mass influencer*, yang terwujud dalam opini publik yang dibentuk oleh media massa. Para pengambil keputusan menggunakan opini publik bukan untuk membentuk kebijakan luar negeri tapi untuk merasionalisasinya. Pendapat dari kelompok ini sering menjadi pertimbangan para pengambil keputusan untuk menyusun kebijakan luar negeri.

Keempat tipe *policy influencers* itu tidak selalu memiliki pandangan sama terhadap suatu kebijakan. Perbedaan juga kerap dimiliki dengan para pengambil keputusan. Untuk menganalisis hubungan tersebut, Coplin menjelaskannya melalui Gambar di bawah ini.

Gambar 1.2

Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan Luar Negeri²⁴



²⁴ William D Coplin. 1992. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoretis terj.* Marsedes Marbun, Edisi Kedua. Bandung: Sinar Baru, hal. 101.

Dalam model pengambilan keputusan kebijakan luar negeri ini, lingkungan internasional bertindak sebagai rangsangan, bagi para pengambil keputusan serta bagi *policy influencers*. Tanda panah menyilang diatas masing-masing menunjukkan input yang diterima untuk dijadikan pertimbangan pengambil keputusan kebijakan luar negeri dan *policy influencers*. Karena perbedaan pandangan dalam melihat situasi internasional, keduanya lantas mengambil posisi berbeda dalam menanggapi satu isu. Karenanya, *policy influencers* akan berupaya mempengaruhi para pengambil keputusan melalui interaksi bidang isu yang ditunjukkan dengan tanda panah yang bertemu. Berikutnya, tanda panah lurus menunjukkan interaksi bidang isu yang berhasil melahirkan kebijakan luar negeri.²⁵

policy influencers system mempengaruhi pengambil keputusan kebijakan Luar Negeri Barack Obama dengan kaitannya dalam rekonstruksi hubungan Amerika Serikat dan Venezuela. Diantara 4 tipe *policy influencers*, partisipan dan birokrasi dapat terlihat langsung dalam proses pengambilan keputusan yaitu birokrasi merupakan bagian internal dalam proses pengambilan keputusan tersebut, dan partisipan yaitu berupa tuntutan publik yang biasanya akan terwakili oleh partai politik.

Media massa dalam pembuatan keputusan kebijakan luar negeri dalam rekonstruksi hubungan Amerika Serikat juga sangat memberi pengaruh. Dimana proses keterlibatan media sangat kompleks, namun bisa disederhanakan menjadi dua hal. Pertama, media sebagai sumber input bagi pembuatan keputusan, dan kedua,

²⁵ *Ibid.*

media sebagai lingkungan yang harus disesuaikan dan dipertimbangkan pemimpin dalam membuat kebijakan. Pemimpin dan pembuat kebijakan luar negeri memang dipengaruhi media. Mereka memelajari berbagai peristiwa yang terjadi dalam sistem internasional dari pers, dan berbagai pesan yang masuk dari arena percaturan politik global melalui saluran komunikasi publik. Dalam tataran ini, media bertindak sebagai sumber, bagian dari lingkungan *input* proses perumusan kebijakan yang menyediakan informasi dan data bagi elit pemimpin.²⁶

Teory pengambilan kebijakan D.Coplin apabila dikaitkan pengambilan keputusan luar negeri AS dalam rekonstruksi hubungan diplomatik dengan Venezuela. Dari situasi politik domestik yaitu pasca pemilihan Umum Amerika Serikat yang membawa Barack Obama sebagai president yang menggantikan George W. Bush. Situasi inilah yang mendukung perubahan arah kebijakan luar negeri AS, yang didalamnya tidak terlepas dari Aktor-aktor birokrasi, media massa dan partai politik. dibawah pemerintahan Barack Obama AS terlihat lebih kooperatif, dengan banyak menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lain termasuk musuh-musuh politiknya, salah satunya Venezuela dengan mengesampingkan konflik-konflik yang pernah terjadi antara negara tersebut.

Selanjutnya dari situasi ekonomi dan militer domestik. keadaan ekonomi Amerika Serikat yang merosot akibat pengeluaran dana militer yang berlebihan dari kebijakan pemerintahan George W. Bush. Sehingga yang menjadi kebutuhun AS

²⁶<http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/global05%20retnachrista.pdf> -

dalam menjalin kerjasama bilateral dengan Venezuela adalah mennetralisasikan keadaan ekonominya kembali dengan mengupayakan mengekspor minyak dari Venezuela yang merupakan negara penghasil minyak terbesar ke 5 di dunia. Disinilah terlihat pengaruh kelompok kepentingan (interst influencer) sebagai pelaku bisnis di Amerika Serikat khususnya bisnis energy minyak sangat mengharapkan ada pemasokan minyak dari Venezuela, seperti apa yang pernah dikatakan Bill Richardson yang pernah menjabat sebagai menteri luar negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa kepentingan energi Amerika Serikat sangat bergantung pada ketersediaan Minyak mentah dan Gas alam. Sementara beberapa tahun terakhir ini Produksi minyak dalam Negeri Amerika Serikat mengalami penurunan dari 9,5 juta barel menjadi 8,7 juta barel perhari.²⁷

Pemerintah sosialis Venezuela di bawah pimpinan Chavez, telah mengambilalih sejumlah perusahaan besar yang dimiliki swasta seperti sektor perminyakan, telekomunikasi, baja dan semen.²⁸ hal ini merupakan faktor yg menghambat berkembangnya penanaman modal perusahaan-prusahaan Amerika Serikat yang ada di venezuela. Sehingga kerjasama kembali dengan Venezuela merupakan hal yang sangat dibutuhkan Amerika Serikat dalam perbaikan kondisi Ekonomi AS yang mengalami ketidakseimbangan (*unstability*).

²⁷ Indrya Samita notosusanto, *Politik Global Amerika Serikat pasca Perang Dingin*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996, hal 120

²⁸“Pendapatan perusahaan minyak venezuela naik 50”,
<http://www.tvone.co.id/berita/view/15524/2009/06/08>

Faktor terakhir adalah dari konteks internasional. Hugo Chavez yang terang-terangan menunjukkan Anti AS pada masa pemerintahan George W. Bush mengalami perubahan persepsi yang melunak setelah pergantian president AS. Konteks inilah yang menjadi ransangan dalam pengambilan keputusan AS. Dimana Banyak yang menilai kebijakan Amerika Serikat dibawah pemerintahan George W. bush adalah penyebab dari terjadinya kerisis Global. untuk itu Amerika Serikat merasa perlu adanya perbaikan citra tersebut. Barack Obama mengawali kerjasama bilateral dengan Venezuela agar memberi jalan melunaknya negara-negara Amerika Latin untuk menjalin kerjasama kembali dengan AS. Citra Amerika Serikat dalam hubungan politik Internasional diharapkan kembali membaik.

D. HIPOTESA

Faktor-faktor yang melatar belakangi kebijakan AS dalam Rekonstruksi hubungan bilateral dengan Venezuela pada masa pemerintahan Barack Obama, yaitu;

1. Birokrasi mempengaruhi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang mengusulkan harus adanya dialog lebih lanjut mengenai hubungan AS-Venezuela dimasa akan datang.
2. Chevron mengkhawatirkan akan adanya pengurangan bahkan pemberhentian pasokan minyak Venesuela ke AS apabila terjadi pemutusan hubungan diplomatik.
3. Media massa sebagai sarana dalam mempublikasikan kritik dan dukungan dari publik mengenai hubungan AS-Venezuela.

4. Partai Demokrat sebagai perwakilan dari partisipan masa pemerintahan Obama berusaha menyampaikan dukungan atas kebijakan rekonstruksi Hubungan diplomatik AS-Venezuela.
5. Adanya perubahan persepsi Hugo Chavez dari Anti-AS menjadi hubungan diplomatik yang lebih terbuka dengan AS pasca pergantian Presiden Amerika Serikat, dari George W. Bush ke Barack Obama.

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan ini adalah:

- Mengeksplanasi fenomena politik dalam rekonstruksi hubungan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Barack Obama dan Venezuela
- Mengeksplanasi faktor yang mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat dalam rekonstruksi hubungan Amerika Serikat dan Venezuela

F. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan data kuantitatif sebagai pendukung. Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah melalui buku, jurnal, situs internet, serta media massa.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Untuk menghindari pelebaran penjelasan mengenai kepentingan Amerika Serikat dalam rekonstruksi Hubungan AS dan Venezuela. Maka dibutuhkan jangkauan penelitian yang berfungsi untuk memfokuskan penelitian ini. Jangkauan penelitian ini dimulai dari terpilihnya Barack Obama menjadi president Amerika Serikat sampai adanya kebijakan untuk melakukan rekonstruksi hubungan Bilateral dengan Venezuela di bawah pemerintahan Hugo Chaves.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

- Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, jangkauan penelitian, sistematika penulisan.
- Bab II : Bab ini berisi gambaran umum Politik Luar Negeri Amerika Serikat yang terbagi dalam beberapa sub yaitu: karakteristik dan tujuan dasar serta Prinsip-prinsip Politik Luar Negeri Amerika Serikat, di bab ini juga di sertakan kondisi ekonomi Politik Amerika Serikat pada awal pemerintahan Barack Obama.
- Bab III : Bab ini menggambarkan kondisi Venezuela dan isu-isu dalam hubungan diplomatik AS-Venezuela, dalam bab ini juga menjelaskan

persepsi Anti AS Hugo Chavez yang melunak pasca pergantian president AS.

Bab IV : Bab ini menjelaskan kebijakan AS terhadap Venezuela dan bagaimana policy influencers mempengaruhi kebijakan rekonstruksi hubungan diplomatik AS-Venezuela.

Bab V : Kesimpulan